

TINJAUAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

Adriansyah¹,

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
Email: adriansyah@unm.ac.id, No Hp 08114441755

Fina Ruzika Zaimar²

Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar
Email: fina.ruzika.zaimar@unm.ac.id, No Hp 083125985491

Yulia Yunita Yusuf³

Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar
Email: yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id No Hp 08121736273

Anisatun Humayrah Rais⁴

Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar
Email: anisatun.humayrah.rais@unm.ac.id No Hp 085342913327

Andi Muh Syukur Hidayatullah⁵

Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar
Email: andi.muh.syukur@unm.ac.id No Hp 081354329996

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat pada periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi yang mencakup jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang dilaporkan tepat waktu serta realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu mengalami fluktuasi. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 43,54%, namun terjadi penurunan sebesar 12,39% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 14,91%, namun penerimaan menurun tajam pada tahun 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi individu. Pada tahun 2023, terdapat sedikit peningkatan sebesar 1,25%, meskipun jumlah penerimaan masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penguatan kebijakan fiskal untuk mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pelaporan SPT Tahunan, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to analyze the realization of on-time Individual Annual Tax Return (SPT) reporting and the realization of Individual Income Tax revenue at the West Makassar Pratama Tax Office (KPP Pratama Makassar Barat) for the 2019-2023 period. This study uses a descriptive quantitative analysis method. The research data were obtained through documentation techniques, including the number of on-time Individual Annual Tax Returns reported and the realization of Individual Income Tax revenue over the past five years. The results show that the realization of on-time Individual Annual Tax Return reporting

experienced fluctuations. A significant increase occurred in 2021, with a growth of 43.54%, but a decline of 12.39% was observed in 2023 compared to the previous year. This reflects challenges in improving individual taxpayer compliance. Meanwhile, the realization of Individual Income Tax revenue also showed a fluctuating trend. The highest increase occurred in 2020, with a growth of 14.91%, but revenues dropped sharply in 2021 and 2022 due to the impact of the COVID-19 pandemic on individuals' economic activities. In 2023, there was a slight increase of 1.25%, although the revenue level had not yet returned to pre-pandemic levels. These findings indicate the need for efforts to enhance individual taxpayer compliance and strengthen fiscal policies to optimize Individual Income Tax revenue.

Keywords: Annual SPT Reporting, Personal Income Tax Receipts, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut (Suharyadi, 2019), pajak masih menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai target penerimaan pajak tiap tahun khususnya pada KPP Pratama Makassar barat, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat yang dalam hal ini merupakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Nafia and Sunandar, 2016) bahwa penerimaan pendapatan suatu Negara mencerminkan bagaimana Negara tersebut untuk maju. Pajak adalah salah satu penerimaan Negara yang berpotensi besar. Sedangkan menurut (Rahmini and Nordiansyah 2022) bahwa pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama APBN. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengharapkan dukungan semua kalangan untuk membantu terealisasinya pendapatan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan Negara dalam membangun dan memajukan suatu Negara.

Pemerintah melakukan beberapa usaha agar target pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dapat dicapai. Sebagaimana menurut Maria (2011) dalam (Alfian 2013) bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif dan pasif, serta penegakan hukum.

KPP Pratama Makassar Barat merupakan salah satu KPP yang berperan dalam melayani masyarakat dalam sektor perpajakan dan membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan Negara melalui sektor pajak. Berikut dapat dilihat Jumlah NPWP Orang Pribadi terdaftar yang aktif pada KPP Pratama Makassar Barat dalam 3 (Tiga) Tahun berakhir:

Tabel 1. Jumlah NPWP aktif Orang Pribadi terdaftar KPP Makassar Barat

No	Tahun	Jumlah NPWP Aktif Wajib Pajak Orang Pribadi
1	2021	51.267
2	2022	55.884
3	2023	51.793

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah NPWP Orang Pribadi yang aktif dari tahun 2021-2023. Jumlah NPWP aktif pada tahun 2022 mengalami peningkatan namun pada tahun 2023 jumlah NPWP aktif Orang Pribadi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat NPWP Wajib Pajak yang dinonaktifkan atau NPWP dihapuskan. NPWP yang dinonaktifkan apabila wajib pajak telah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Berkurangnya jumlah NPWP aktif Orang Pribadi ini tentu

akan berpotensi memberikan dampak terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada KPP Makassar Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi dan menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2019-2023 pada KPP Pratama Makassar Barat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pelaporan SPT Tahunan dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat”

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan data dan fenomena secara faktual, sistematis, dan akurat. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Alat Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deksriptif dilakukan terhadap data realisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2019-2023. Fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis realisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada KPP Makassar Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2019-2023

Berikut ini merupakan data jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2019-2023 pada KPP Makassar Barat.

Tabel 2. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi Tepat Waktu	Pertumbuhan (%)
1	2019	39.489	-
2	2020	35.311	-10.58%
3	2021	50.687	43.54%
4	2022	49.551	-2.24%
5	2023	43.413	-12.39%

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tepat waktu. Pada tahun 2020 jumlah SPT tahunan dilaporkan tepat waktu sebanyak 35.311 SPT atau mengalami penurunan -10,58% dari tahun 2019. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas pelaporan wajib pajak. Pada tahun 2021 jumlah SPT tahunan dilaporkan tepat waktu sebanyak 50.687 atau mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 43,54% hal ini merupakan tahun dimana pertumbuhan SPT masuk terbesar ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari sisi kepatuhan wajib pajak atau optimalisasi sistem pelaporan pajak oleh KPP. . Sedangkan pada tahun 2022 jumlah SPT dilaporkan tepat waktu sebanyak 49.551 SPT atau mengalami penurunan sebesar -2,24%. Dan pada tahun 2023 SPT kembali menurun tajam sebesar 12,39% menjadi 43.413. Ini mencerminkan adanya tantangan baru dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Fluktuasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu mencerminkan pengaruh faktor eksternal seperti pandemi serta kemungkinan tantangan dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap wajib pajak. Tahun 2021 menjadi titik tertinggi dalam pelaporan SPT tepat waktu, sementara tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2019-2023

Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2019-2023 Pada KPP Makassar Barat.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Pertumbuhan (%)
1	2019	Rp 43.071.031.516	0.00%
2	2020	Rp 49.492.251.194	14.91%
3	2021	Rp 35.108.752.309	-29.06%
4	2022	Rp 21.428.321.121	-38.97%
5	2023	Rp 21.696.237.600	1.25%

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

Pada Tabel 3 diatas menunjukkan jumlah penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2019 -2023 pada KPP Pratama Makassar Barat. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi Rp 49.492.251.194 atau sebesar 14,91%. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan kesadaran atau kemampuan wajib pajak individu dalam memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2020 menjadi Rp 35.108.752.309 atau sebesar -29,06%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian individu. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2021 menjadi Rp 21.428.321.121 atau sebesar -38,97%. Ini menjadi titik penerimaan terendah selama lima tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2023 penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi mengalami peningkatan menjadi Rp 21.696.237.600 atau sebesar 1,25%. Namun, angka ini masih jauh di bawah tingkat penerimaan sebelum pandemi, khususnya dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2019 – 2023 terus mengalami titik memprihatinkan. Tren fluktuasi ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti pandemi COVID-19, yang berdampak langsung terhadap pendapatan individu. Upaya pemulihan mulai terlihat pada tahun 2023, tetapi diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan kapasitas wajib pajak individu agar penerimaan dapat kembali ke tingkat yang lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu di KPP Pratama Makassar Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Tahun 2021 mencatat peningkatan tertinggi dalam jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu, menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan dalam pelaporan tepat waktu, yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat juga menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2019-2023. Peningkatan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2020, namun penerimaan menurun tajam pada tahun 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha. Meski terjadi sedikit peningkatan penerimaan pada tahun 2023, penerimaan masih belum kembali ke tingkat yang dicapai sebelum pandemi.

5. REFERENSI

- Alfian, R. (2013). Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *e-Perpajakan*, 1–19.
- Dewata, E., Jauhari, H., Sari, Y., & Mouliyan, C. A. (2017). Determinan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 26–34.
- Hanum, Z. (2018). Analisis penyampaian SPT masa dan jumlah wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Irfan, M. F., & Alpi, M. (2023). Analisis faktor penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), 1–8.
- Nafia, D., & Sunandar. (2016). Analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah

- kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. *Senit*, 170–175.
- Rahmini, N. A., & Nordiansyah, M. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tahun 2019-2021. *Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan*, 3(1).
- Safitra, D. A. (2021). Penerimaan wajib pajak pada awal implementasi e-faktur pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3.
- Suharyadi, D. (2019). Analisa tingkat kepatuhan WPOP terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 39–44.
- Toatubun, H. (2019). Analisis disparitas wilayah antar provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1–22.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Valianti, M. R., & Damayanti, R. (2016). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lahat. *Jurnal Pajak*, 10–23.